BAB III
AKUNTANSI PESANTREN

A. Latar Belakang dan Tujuan

Perkembangan pondok pesantren di Indonesia terjadi cukup signifikan. Perkembangan tersebut sesuai dengan keberadaan pondok pesantren yang dapat mendukung perkembangan pengajaran ilmu agama serta berpotensi untuk menghasilkan output sumber daya yang mampu menghadapi gejolak perekonomian di masa depan. Perkembangan zaman ini banyak menuntut lembaga atau organisasi untuk menertibkan sistem pengelolaan keuangan, termasuk pondok pesantren. Dimana hingga kini masih banyak pondok pesantren yang tercatat memiliki masalah internal dan eksternal dalam pencatatan keuangan, seperti pencatatan yang masih sederhana, alokasi sumber daya yang tidak terkontrol dan kurang transparan, sehingga informasi yang diberikan pada pemberi sumber daya belum spesifik.

Mempertimbangkan pentingnya sistem pencatatan keuangan pada pesantren, Bank Indonesia bersama Ikatan Akuntan Indonesia mencetuskan Pedoman Akuntansi Pesantren, dengan harapan agar pondok pesantren mampu menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Pada dasarnya, sistem pencatatan keuangan pondok pesantren berciri khas tidak memaksa, sehingga nantinya dapat menghasilkan output yang mampu memberikan informasi lengkap pada *stakeholder* .[1]

Kriteria pondok pesantren yang dianjurkan untuk menerapkan Pedoman Akuntansi Pesantren adalah pondok pesantren yang berbentuk yayasan. Artinya, kekayaan yang dimiliki oleh pemilik atau pendiri tidak dicampurkadukkan dengan kekayaan pondok pesantren, sehingga nantinya dalam proses pelaporan terjadi perbedaan pada aset dan liabilitas.

Selain lembaga pesantren, unit usaha yang dimiliki yayasan secara independen memiliki kedudukan sebagai entitas atau unit pelaporan.

---

[1] Asih Niati, et, all., *Pelatihan Pengelolaan Manajemen Keuangan dan Pelaporan Keuangan Akuntansi Pesantren bagi Pengelola Yayasan Pondok Pesantren X di Kota Semarang*, Jurnal Surya Masyarakat, Vol. 02, No. 01, November 2019, hal. 76-77

Namun, unit usaha yang berdiri sebagai badan hukum seperti perseroan terbatas dan koperasi, tidak tergolong dalam unit pelaporan keuangan pondo pesantren.

Tujuan dari penyusunan laporan keuangan yayasan pondok pesantren yaitu menyediakan informasi kepada *stakeholder* terkait kondisi keuangan, aliran kas, kinerja, serta hal-hal lain yang dapat digunakan pertimbangan dalam membuat keputusan. Di samping itu, adanya laporan keuangan adalah sebagai bentuk tanggung jawab yayasan pesantren kepada pemberi sumber daya atas pengalokasian sumber daya yang telah diberikan.[2]

B. Akuntansi Aset, Liabilitas, Penghasilan dan Beban, dan Aset Neto

1. Akutansi Aset

   Aset yang dimiliki yayasan pondok pesantren adalah sebagai bentuk manfaat yang didapatkan dari aktivitas masa lalu yang kemudian dimanfaatkan kembali untuk kepentingan yang akan datang. Aset digolongkan menjadi beberapa kelompok yaitu:

   a. Aset Lancar

      Aset lancar yaitu harta yang dimiliki oleh suatu entitas dalam bentuk kas atau setara kas, yang diprediksi mampu dimanfaatkan dalam jangka pendek atau pasca pelaporan satu periode.

      1) Kas atau setara kas

         Kas merupakan salah satu bagian aset yang bersifat sangat likuid. Fisik kas umumnya berupa mata uang kertas dan logam yang digunakan sebagai sarana transaksi resmi. Sedangkan setara kas adalah aset atau investasi yang sifatnya likuid, berjangka waktu pendek, dan bisa dicairkan dalam bentuk kas dalam periode yang singkat, tanpa ada perubahan nilai yang signifikan. Jenis kas dan setara kas pada laporan keuangan berupa kas mata uang rupiah ataupun asing, giro, deposito berjangka, dan tabungan. Kas digunakan untuk operasional pondok.

---

[2] Ikatan Akuntan Indonesia, Pedoman Akuntansi Pesantren, Cetakan Pertama, (Jakarta: Bank Indonesia, 2018), hal. 7-11

Pengakuan kas atau setara kas terjadi ketika adanya transaksi sebesar nilai nominal dan dihentikan pengakuannya pada saat digunakan senilai nominal tersebut. Apabila transaksi menggunakan mata uang asing maka pengakuan terjadi pada saat diterima sebesar kas tersebut dan dikurskan ke rupiah. Sedangkan penghentian pengakuan terjadi apabila kas telah dimanfaatkan sebesar nominal rupiah. Berikut adalah contoh ilustrasi jurnalnya:

a) Saat penerimaan

Dr. Kas atau setara kas	Rp. xxx	
Cr. Pendapatan		Rp. xxx

b) Saat penggunaan

Dr. Perlengkapan	Rp. xxx	
Cr. Kas atau setara kas		Rp. xxx

2) Piutang Usaha

Piutang usaha merupakan aset entitas yang berada dalam pihak lain atau hak gugat atas harta yang sudah dipindahtangankan. Timbulnya piutang usaha disebabkan dari aktivitas penjualan jasa atau barang oleh yayasan pondok pesantren. Untuk mempermudah membaca piutang, pihak pondok pesantren dianjurkan untuk menggunakan buku bantu piutang. Buku bantu piutang akan membantu pondok pesantren dalam menganalisis transaksi piutang tidak tertagih, penyisihan, dan sebagainya.

Penyisihan piutang usaha yang tidak tertagih diakui sebagai beban dan pengakuan akan dihentikan apabila piutang dilunasi atau saat penghapusan buku.

Contoh ilustrasi jurnal:

a) Saat pengakuan

Dr. Piutang usaha	Rp. xxx	
Cr. Penjualan		Rp. xxx

b) Saat penyisihan

Dr. Beban penyisihan	Rp. xxx	
Cr. Akumulasi penyisihan		Rp. xxx

c) Saat pelunasaan

Dr. Kas atau setara kas	Rp. xxx	
Cr. Piutang usaha		Rp. xxx

d) Saat penghapusan buku

Dr. Akumulasi penyisihan	Rp. xxx	
Cr. Piutang usaha		Rp. xxx

Pondok pesantren yang memiliki unit usaha biasanya akan menemui transaksi hutang piutang. Misalnya, sebuah pondok pesantren memiliki unit usaha berupa toko sembako yang menyediakan beberapa kebutuhan sehari-sehari seperti sembako, minyak, dan telur, yang kemudian terjadi transaksi penjualan secara kredit kepada pembeli sebesar Rp 200.000, maka pencatatannya adalah sebagai berikut:

Dr. Piutang usaha	Rp. 200.000	
Cr. Penjualan		Rp. 200.000

3) Biaya dibayar di muka

Semua aktivitas pemenuhan biaya di awal guna mendapatkan nilai kemanfaatan, yang nantinya akan digunakan pada periode depan. Beberapa contoh jenis biaya dibayar di muka yaitu biaya sewa dibayar di muka, biaya asuransi dibayar di muka, biaya gaji dibayar dimuka, dan biaya pajak penghasilan dibayar di muka. Dan biaya dibayar di muka yang biasa terjadi dalam lingkup yayasan pondok pesantren adalah biaya gaji dibayar di muka untuk para pengajar dan karyawan dan biaya sewa dibayar di muka untuk operasional pondok, seperti sewa kendaraan, mesin, ataupun gedung untuk kegiatan unit usaha, dan lain-lain.

Biaya dibayar di muka diakui ketika dilakukan proses transaksi pengeluaran biaya dengan nilai manfaat belum diterima. Biaya dibayar di muka akan berkurang apabila sudah diterima manfaatnya atau sudah habis masa manfaatnya. Sedangkan pada akhir pelaporan, pengakuan biaya dibayar di muka sebanding dengan manfaat yang

belum diakui pada priode berjalan. Di bawah ini adalah contoh ilustrasi jurnal biaya dibayar di muka:

a) Saat pengeluaran

Dr. Sewa dibayar di muka	Rp. xxx	
Cr. Kas atau setara kas		Rp. xxx

b) Saat penyesuaian akhir periode

Dr. Beban sewa dibayar di muka	Rp. xxx	
Cr. Sewa dibayar di muka		Rp. xxx

b. Aset Tidak Lancar

1) Investasi pada entitas lain

Investasi adalah penanaman modal dalam bentuk hak milik atas saham kepada entitas lain. Investasi yang dimaksudkan bukanlah saham atas nama pribadi melainkan nama yayasan pondok pesantren.

Ada beberapa kategori investasi pada entitas lain yaitu investasi pada aset keuangan (*financial aset)* dengan metode biaya, investasi pada entitas anak (*subsidiary)* dengan metode ekuita, investasi pada entitas asosiasi (*associate)* dengan metode biaya, dan investasi pada entitas ventura atau entitas yang dikendalikan secara bersama dengan menggunakan metode biaya.

2) Properti investasi

Properti investasi dapat bewujud bangunan atau tanah yang dimiliki dan menghasilkan pendapatan. Properti investasi tidak digunakan untuk kegiatan operasional ataupun tujuan administratif. Pengakuan atas properti investasi adalah sebagai berikut:

a) Pengakuan properti investasi terjadi ketika terjadi akuisisi

Dr. Properti investasi	Rp. xxx	
Cr. Kas atau setara kas		Rp. xxx

b) Penyusutan yang terjadi diakui sebagai beban

Dr. Beban penyusutan	Rp. xxx	
Cr. Akumulasi penyusutan		Rp. xxx

c) Penghentian pengakuan terjadi apabila properti investasi di transfer ke pos aset tetap atau dihapuskan

Dr. Akumulasi penyusutan Rp. xxx

Cr. Properti investasi Rp. xxx

d) Apabila terjadi pemulihan atas penurunan nilai diakui sebagai keuntungan dan apabila terjadi penurunan nilai diakui sebagai kerugian.

Dr. Akumulasi penurunan nilai Rp. xxx

Cr. Keuntungan pemulihan nilai Rp. xxx

Dan

Dr. Kerugian penurunan nilai Rp. xxx

Cr. Akumulasi penurunan nilai Rp. Xxx

c. Aset Tetap

Aset tetap merupakan harta berwujud jangka panjang yang dimiliki oleh suatu entitas dengan tujuan untuk dimanfaatkan dalam rangka pemenuhan kegiatan operasional. Aset tetap yang dimaksudkan bisa berupa tanah, bangunan, peralatan, dan lain-lain. Biaya perawatan untuk aset tetap terhitung sebagai beban. Penyusutan pada aset tetap dilakukan secara garis lurus kecuali untuk penyusutan tanah (tidak disusutkan). Contoh jurnal transaksi:

1) Dr. Peralatan Rp. xxx

Cr. Kas atau setara kas Rp. xxx

2) Dr. Beban penyusutan peralatan Rp. xxx

Cr. Akumulasi penyusutan peralatan Rp. xxx

2. Liabilitas

Liabilitas atau kewajiban dalam pondok pesantren digolongkan menjadi kewajiban jangka panjang dan jangka pendek.[3]

a. Liabilitas imbalan kerja

Liabilitas imbalan kerja merupakan imbalan yang diberikan kepada pengurus atau pegawai yang ada di yayasan pondok pesantren atas jasa yang telah diberikan. Liabilitas imbalan

[3] Ikatan Akuntan Indonesia, *Pedoman Akuntansi Pesantren*…, hal. 43

kerja terbagi menjadi beberapa kategori beserta contoh ilustrasinya yaitu:

1) Imbalan kerja jangka pendek dan pesangon pemutusan kerja
   a) Pengakuan
      Dr. Beban imbalan kerja Rp. xxx
         Cr. Liabilitas jangka pendek Rp. xxx
   b) Penghentian pengakuan
      Dr. Liabilitas jangka pendek Rp. xxx
         Cr. Beban imbalan kerja Rp. xxx
2) Imbalan jangka panjang lain dan paskakerja
   a) Pengakuan
      Dr. Beban imbalan kerja Rp. xxx
         Cr. Liabilitas jangka panjang Rp. xxx
   b) Penghentian pengakuan
      Dr. Liabilitas jangka panjang Rp. xxx
         Cr. Beban imbalan kerja Rp. Xxx

b. Hutang jangka panjang dan pendek

Hutang jangka pendek merupakan kewajiban yang pelunasannya akan menggunakan salah dari aktiva lancar dengan masa jatuh tempo maksimal satu tahun atau satu periode pelaporan. Sebagai contoh dari hutang pendek adalah utang dagang dan hutang wesel. Sedangkan hutang jangka panjang adalah kewajiban yang harus dilunasi kepada pihak pemberi pinjaman dalam waktu lebih dari satu periode pelaporan. Contoh hutang jangka panjang adalah hutang deviden. Hutang jangka panjang atau pendek adalah pinjaman tanpa bunga oleh yayasan pondok pesantren atau unit usaha yang dimiliki. Pengakuan dan pengukuran hutang jangka panjang atau pendek adalah sebagai berikut:

1) Pengakuan
   Dr. Kas atau setara kas Rp. xxx
      Cr. Hutang dagang Rp. Xxx

2) Penghentian pengakuan

Dr. Hutang dagang	Rp. xxx	
Cr. Kas atau setara kas		Rp. xxx

3) Pengalihan ke liabilitas jangka pendek

Dr. Hutang jangka panjang	Rp. xxx	
Cr. Hutang jangka pendek		Rp. xxx

c. Pendapatan diterima di muka

Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang diterima oleh pondok pesantren sebagai hasil penjualan barang atau penyedia jasa yang belum sepenuhnya diakui sebagai pendapatan. Salah satu contohnya adalah sewa dibayar di muka. Pengukuran pendapatan didasarkan pada nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih dalam tanggungan yang masih harus diterima.[4]

Ilustrasi jurnal:

1) Saat penerimaan

Dr. Kas dan setara kas	Rp. xxx	
Cr. Pendapatan diterima di muka		Rp. xxx

2) Akhir periode

Dr. Pendapatan diterima di muka	Rp. xxx	
Cr. Pendapatan yang terkait		Rp. xxx

3) Reklasifikasi

Dr. Pendapatan diterima di muka (panjang)	Rp. xxx	
Cr. Pendapatan diterima di muka (pendek)		Rp. xxx

3. Penghasilan dan Beban

Penghasilan dan beban dalam yayasan pondok pesantren terbagi menjadi dua yaitu penghasilan dan beban dengan pembatasan serta penghasilan dan beban tanpa pembatasan. Pengklasifikasian penghasilan dan beban disebabkan karena adanya pembatasan pemanfaatan yang disyaratkan oleh pemberi sumbangsih. Pembatasan-pembatasan tersebut diatur dalam

---

[4] Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik*…, hal. 114

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non Laba.

a. Penghasilan dan beban dengan pembatasan

Penghasilan dan beban dengan pembatasan, dibatasi oleh waktu dan tujuan tertentu. Contoh dari penghasilan dengan pembatasan yaitu bantuan dari pemerintah, wakaf baik dalam bentuk uang atau harta lain, hibah dari eksternal yayasan, dan lain-lain yang dibatasi untuk alokasi kegiatan ibadah, dan sebagainya. Sedangkan jenis beban dengan pembatasan ditentukan oleh pemberi sumber daya, perundang-undangan, atau berdasarkan ketentuan syariah yang berlaku untuk mewujudkan tujuan tertentu.[5]

1) Pendapatan dengan pembatasan lebih besar dari beban dengan pembatasan

a) Saat penerimaan

Dr. Kas atau setara kas	Rp. xxx	
Cr. Pendapatan dengan pembatasan		Rp. xxx

b) Saat penggunaan

Dr. Beban dengan pembatasan	Rp. xxx	
Cr. Kas atau setara kas		Rp. xxx

c) Saat akhir periode

Dr. Pendapatan dengan pembatasan	Rp. xxx	
Cr. Beban dengan pembatasan		Rp. xxx
Cr. Aset neto dengan pembatasan		Rp. xxx

d) Saat pembebasan aset neto pembatasan

Dr. Aset neto dengan pembatasan	Rp. xxx	
Cr. Aset neto tanpa pembatasan		Rp. xxx

2) Pendapatan dengan pembatasan sama dengan beban dengan pembatasan

a) Saat penerimaan

Dr. Kas atau setara kas	Rp. xxx	
Cr. Pendapatan dengan pembatasan		Rp. xxx

[5] Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Rancangan Pemutakhiran Pedoman Akuntansi Pesantren* (Pedoman Akuntansi Pesantren 2020), Jakarta: DSAK-IAI, hal. 68-71

b) Saat penggunaan

Dr. Beban dengan pembatasan	Rp. xxx	
Cr. Kas atau setara kas		Rp. xxx

c) Saat akhir periode

Dr. Pendapatan dengan pembatasan	Rp. xxx	
Cr. Beban dengan pembatasan		Rp. xxx

3) Pendapatan dengan pembatasan lebih kecil dari beban dengan pembatasan

a) Saat penerimaan

Dr. Kas atau setara kas	Rp. xxx	
Cr. Pendapatan dengan pembatasan		Rp. xxx

b) Saat penggunaan

Dr. Beban dengan pembatasan	Rp. xxx	
Dr. Beban tanpa pembatasan	Rp. xxx	
Cr. Kas atau setara kas		Rp. xxx

c) Saat akhir periode

Dr. Pendapatan dengan pembatasan	Rp. xxx	
Dr. Aset neto tanpa pembebasan	Rp. xxx	
Cr. Beban dengan pembatasan		Rp. xxx
Cr. Beban tanpa pembatasan		Rp. xxx

b. Penghasilan dan beban tanpa pembatasan

Setiap aktivitas penghasilan dan beban yang tidak dibatasi oleh waktu dan tujuan oleh pemberi sumber dana. Penghasilan tanpa pembatasan pada yayasan pondok pesantren antara lain kontribusi dari santri, sumbangan dari pengurus atau penduduk pondok, bantuan dari luar yayasan yang tidak mensyaratkan adanya pembatasan pemakaian, aset neto dan pendapatan tanpa pembatasan. Penghasilan tersebut kemudian dialokasikan dalam bentuk beban pendidikan, umum dan administrasi, serta akomodasi dan konsumsi. Penghasilan dan

beban tanpa pembatasan disajikan dalam perubahan aset neto tanpa pembatasan.[6]

Beban pendidikan dalam yayasan pondok pesantren yaitu Contoh ilustrasi jurnal sebagai berikut:

1) Penerimaan penghasilan
   a) Kontribusi santri

Dr. Kas atau setara kas	Rp. xxx	
Cr. Pendapatan kontribusi santri		Rp. xxx

   b) Hibah dari pengurus dan pendiri yayasan pondok pesantren

Dr. Kas atau setara kas	Rp. xxx	
Cr. Pendapatan hibah pengurus dan pendiri		Rp. xxx

2) Penggunaan beban
   a) Beban pendidikan

Dr. Beban pendidikan	Rp. xxx	
Cr. Kas atau setara kas		Rp. xxx

   b) Beban akomodasi dan konsumsi

Dr. Beban akomodasi	Rp. xxx	
Dr. Beban konsumsi	Rp. xxx	
Cr. Kas atau setara kas		Rp. xxx

4. Aset Neto

Aset neto merupakan hak residual yayasan pondok yang pesantren yang sudah dikurangi dengan semua liabilitas. Aset neto dalam yayasan pondok pesantren diklasifikasikan berdasarkan ada tidaknya pembatasan yang disyaratkan oleh pemberi dana. Pengklasifikasian tersebut akan memudahkan entitas dalam menggolongkan aset atau pendapatan yang diterima. Dasar pengaturan aset neto terdapat dalam Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non Laba.

a. Aset Neto Dengan Pembatasan

Aset neto dengan pembatasan yaitu aset yang diberikan oleh sumber daya dengan mensyaratkan adanya pembatasan

[6] Ibid., hal. 65-67

baik dalam pemanfaatan ataupun jangka waktu pemanfaatan, guna mencapai tujuan tertentu. Aset neto dengan pembatasan merupakan akumulasi pendapatan dengan pembatasan dikurangi dengan beban dengan pembatasan.

Pendapatan dengan pembatasan dan beban dengan pembatasan di akhir periode, ditutup ke aset neto dengan pembatasan. Aset neto dengan pembatasan dapat direklasifikasi ke aset neto tanpa pembatasan apabila sudah habis masa atau berakhirnya waktu pembatasan dan terpenuhinya suatu tujuan. Salah satu aset neto dengan pembatasan yaitu sumbangan atau hibah yang dimaksudkan untuk pembangunan gedung sekolah. [7] Berikut adalah ilustrasi jurnal:

1) Akhir periode

Dr. Pendapatan dengan pembatasan	Rp. xxx	
Cr. Beban dengan pembatasan		Rp. xxx
Cr. Aset Neto dengan pembatasan		Rp. xxx
Atau		
Dr. Pendapatan dengan pembatasan	Rp. xxx	
Dr. Aset neto dengan pembatasan	Rp. xxx	
Cr. Beban dengan pembatasan		Rp. xxx

2) Saat pembebasan oleh aset neto dengan pembatasan

Dr. Aset Neto tanpa pembatasan	Rp. xxx	
Cr. Aset Neto dengan pembatasan		Rp. xxx

Contoh transaksi aset neto dengan pembatasan yaitu:

Seorang donatur memberikan sumbangan kepada yayasan pondok pesantren sebesar Rp 150.000.000 yang dimaksudkan agar dialokasikan untuk memenuhi fasilitas media di pondok pesantren seperti pembelian seperangkat komputer dan alat ekektronik lainnya. Maka jurnalnya yaitu:

1) Saat penerimaan

Dr. Pendapatan dengan pembatasan	Rp. 150.000.000	
Cr. Aset Neto dengan pembatasan		Rp. 150.000.000

[7] Ibid., hal. 62-63

2) Akhir periode, dengan biaya pengunaan Rp 115.000.000

Dr. Pendapatan dengan pembatasan	Rp. 150.000.000	
Cr. Beban dengan pembatasan		Rp. 115.000.000
Cr. Aset Neto dengan pembatasan		Rp. 35.000.000

3) Saat pembebasan aset neto

Dr. Pendapatan dengan pembatasan	Rp. 35.000.000	
Cr. Aset Neto tanpa pembatasan		Rp. 35.000.000

b. Aset Neto Tanpa Pembatasan

Aset neto tanpa pembatasan yaitu aset yang diberikan oleh sumber daya tanpa ada batasan dalam pemanfaatannya. Aset neto tanpa pembatasan merupakan akumulasi pendapatan tanpa pembatasan dikurangi dengan beban tanpa pembatasan. Jenis pendapatan yang masuk dalam kategori pendapatan tanpa pembatasan yaitu kontribusi santri, sumbangan atau bantuan dari pemerintah, korporasi, dan masyarakat yang tidak ada pembatasan penggunaannya. Sedangkan untuk beban yang tergolong dalam beban tanpa pembebanan yaitu beban pendidikan, beban umum dan administrasi, serta beban akomodasi dan konsumsi.

Pendapatan tanpa pembatasan dan beban tanpa pembatasan di akhir periode, ditutup ke aset neto tanpa pembatasan. Berikut adalah contoh jurnal yang menggambarkan akumulasi aset neto tanpa pembatasan:[8]

Ilustrasi Jurnal:

1) Akhir periode

Dr. Pendapatan tanpa pembatasan	Rp. xxx	
Cr. Beban tanpa pembatasan		Rp. xxx
Cr. Aset neto tanpa pembatasan		Rp. xxx

Atau

Dr. Pendapatan tanpa pembatasan	Rp. xxx	
Dr. Aset neto tanpa pembatasan	Rp. xxx	
Cr. Beban tanpa pembatasan		Rp. xxx

[8] Ibid., hal. 60-61

2) Saat pembebasan oleh aset neto dengan pembatasan

Dr. Aset Neto dengan pembatasan Rp. xxx

Cr. Aset Neto tanpa pembatasan Rp. xxx

C. Penyajian Laporan Keuangan

Seperti pada umumnya, laporan keuangan yayasan pondok pesantren menyajikan posisi keuangan, kinerja, arus kas, serta pengungkapan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyajian laporan keuangan yayasan pondok pesantren didasarkan pada konsep materialitas. Informasi dianggap material apabila terjadi kelalaian dalam pencatatan dapat mempengaruhi hasil keputusan. Sedangkan untuk periode pelaporan, disajikan dalam periode tahunan kecuali bagi yayasan pesantren yang terhitung baru mendirikan, dapat disajikan dalam periode yang lebih singkat.

Laporan keuangan berdasarkan pedoman akuntansi pesantren dan PSAK 45 memiliki keterkaitan yang besar. Secara umum, keduanya sama – sama membahas tentang penyajian laporan keuangan entitas yang tidak berorientasi laba. Hanya saja ada perbedaan di antara keduanya yaitu antara lain:

	PAP 2020	**PSAK 45**
Target	Yayasan pondok pesantren	Entitas nirlaba (umum)
Laporan Keuangan	1. Laporan posisi keuangan 2. Laporan perubahan aset neto 3. Laporan arus kas 4. Catatan atas laporan keuangan	1. Laporan posisi keuangan 2. Laporan aktivitas 3. Laporan arus kas 4. Catatan atas laporan keuangan
Aset neto	Terbagi dalam: 1. Aset neto dengan pembatasan 2. Aset neto tanpa pembatasan	Terbagi dalam: 1. Aset neto tidak terikat 2. Aset neto terikat permanen 3. Aset neto terikat temporer

1. **Laporan Posisi Keuangan**

Laporan posisi keuangan yayasan pondok pesantren menyajikan informasi terkait aset, liabilitas, dan aset neto, dimana laporan tersebut dapat diakses oleh pemberi sumber daya, anggota yayasan pondok pesantren, dan pihak eksternal pengguna laporan keuangan lainnya. Dengan adanya laporan posisi keuangan, para *stakeholder* dapat menilai kinerja entitas dalam memberikan jasa dan mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.

Seperti pada umumnya, aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan terbagi menjadi beberapa jenis. Aset terdiri dari kas atau setara kas, piutang, bangunan, tanah, persediaan, dan sebagainya. Sedangkan liabilitas terdiri dari hutang jangka pendek dan panjang serta pendapatan diterima di muka.

Di bawah ini adalah contoh ilustrasi laporan posisi keuangan Yayasan Pondok Pesantren "Y" yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren.

Tabel 3.1
Laporan Posisi Keuangan

YAYASAN PONDOK PESANTREN Y **Laporan Posisi Keuangan** **Per 31 Desember 2019**	
Aset	
Kas	xxx
Piutang	xxx
Tanah	xxx
Bangunan	xxx
Akumulasi penyusutan bangunan	(xxx)
Kendaraan	xxx
Akumulasi penyusutan kendaraan	(xxx)
Investasi pada entitas lain	xxx
Total Aset	**xxx**
Kewajiban	xxx
Hutang bank	xxx
Total Liabilitas	**xxx**
Aset Neto	xxx
Aset Neto Tanpa Pembatasan	
Hibah	xxx
Iuran bulanan pengurus	xxx
Kontribusi santri, siswa	xxx
Infaq Jariyah	xxx
Bantuan pemerintah	xxx
Total Aset neto tanpa pembatasan	**xxx**
Aset Neto Dengan Pembatasan	
Infaq bangunan	xxx
Infaq kegiatan	xxx
Infaq pendidikan	xxx
Total Aset neto tanpa pembatasan	**xxx**
Total Aset Neto	**xxx**
Total Liabilitas dan Aset Neto	**xxx**

2. Laporan Perubahan Aset Neto

Dalam laporan laporan perubahan aset neto terdapat dua bagian yaitu nilai pendapatan dan biaya entitas non profit selama satu periode pelaporan. Pendapatan yayasan pondok pesantren merupakan hasil dari kegiatan operasional atau aktivitas lain yang bersifat insidental. Sedangkan beban disajikan berdasarkan kriteria fungsional.

Berikut adalah contoh ilustrasi laporan perubahan aset neto pada Yayasan Pondok Pesantren "Y"

Tabel 3.2
Laporan Perubahan Aset Neto

PONDOK PESANTREN Y **Laporan Perubahan Aset Neto** **Per 31 Desember 2019**		
Aset Neto Tanpa Pembatasan		
Pendapatan Tanpa Pembatasan:		
Kontribusi santri	xxx	
Iuran bulanan pengurus	xxx	
Hibah	xxx	
Bantuan pemerintah	xxx	
Infaq jariyah	xxx	
Total pendapatan tanpa pembatasan	**xxx**	
Beban Tanpa Pembatasan:		
Beban pendidikan	xxx	
Beban konsumsi dan akomodasi	xxx	
Beban umum dan administrasi	xxx	
Total beban tanpa pembatasan	**xxx**	
Kenaikan/Penurunan Aset Neto Tanpa Pembebanan		**xxx**
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan		xxx
Aset Neto Tanpa Pembatasan Awal		**xxx**
Aset Neto Tanpa Pembatasan Akhir		**xxx**

Aset Neto Dengan Pembatasan		
Kegiatan A		
Pendapatan	xxx	
Beban	(xxx)	
Surplus	xxx	
Kegiatan B		
Pendapatan	xxx	
Beban	(xxx)	
Kenaikan/Penurunan Aset Neto Dengan Pembatasan		**xxx**
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan		(xxx)
Aset Neto Dengan Pembatasan Awal		**xxx**
Aset Neto Dengan Pembatasan Akhir		**xxx**

3. **Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas adalah laporan yang menyediakan informasi tentang pemasukan dan penggunaan kas atau setara kas selama jangka waktu pelaporan. Dimana laporan tersebut terdiri dari aktivitas operasional, pendanaan, dan investasi.

a. Aktivitas operasional adalah aktivitas utama penghasil pendapatan dan aktivitas lain serupa yang tidak tergolong dalam aktivitas pendanaan dan operasional.
b. Aktivitas pendanaan yaitu aktivitas penerimaan kas dari pemberi sumber daya yang penggunaannya dibatasi secara permanen atau dalam periode yang lama. Seperti adanya batasan perolehan dan penggunaan jangka panjang pada pembangunan dan pemeliharaan aset, imbal hasil, dan deviden.
c. Aktivitas investasi adalah aktivitas perolehan dan pemanfaatan aset jangka panjang serta aset lain yang tidak tergolong dalam setara kas.

Tabel 3.3
Laporan Arus Kas

YAYASAN PONDOK PESANTREN X **Laporan Arus Kas** **Per 31 Desember 2019**	
Aktivitas Operasional	
Perubahan Aset Neto	xxx
Penyesuaian:	
Penyusutan	(xxx)
Kas yang diterima untuk aktivitas operasional	**xxx**
Aktivitas Investasi	
Pembelian aktiva tetap	(xxx)
Kas dikeluarkan untuk aktivitas investasi	**xxx**
Aktivitas Pendanaan	
Pembayaran hutang Bank	(xxx)
Kas diterima untuk aktivitas pendanaan	**(xxx)**

Kenaikan/Penurunan Kas	**xxx**
Kas Awal Tahun	**xxx**
Kas Akhir Tahun	**xxx**

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan entitas yang menyediakan informasi tentang spesifikasi kebijakan akuntansi, analisis realisasi anggaran, dan alur pos-pos laporan keuangan. Gambaran umum yang dimaksudkan dalam lingkup yayasan pondok pesantren antara lain akta pendirian (nomor dan tanggal), riwayat singkat dari yayasan pondok pesantren, struktur organisasi (pengurus), kegiatan utama, dan lokasi operasional.

Ikhtisar kebijakan akuntansi pada yayasan pondok pesantren yaitu:

a. Pengukuran laporan keuangan berdasarkan pada biaya historis
b. Dasar penyusunan laporan keuangan menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas
c. Kebijakan-kebijakan akuntansi lain seperti aset tetap, pengakuan penghasilan dan beban, wakaf, dan investasi[9]

[9] Ikatan Akuntan Indonesia, *Pedoman Akuntansi Pesantren*…, hal. 79-80